



BAGIAN 4

DINAMIKA SOSIAL- EKONOMI RIAU PASCA REFORMASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



NAIK KODA LENGAH, BAHUTERA BERKECAI

(Ketimpangan Ekonomi Masyarakat Riau)

Ketertarikan yang dialami masyarakat Riau tampaknya belum jua beranjak. Masyarakat miskin di Riau yang jumlahnya mencapai 43,8%, rupanya belum jua dapat menikmati berkah dari kehadiran otonomi daerah dan limpahan rezeki desentralisasi fiskal. Kondisi ini terungkap dari data yang dirilis BPS Riau dalam sebuah diskusi akhir tahun yang diselenggarakan *Institute of Public Interest and Regional Development (INSPIRED)*. Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 10,2%, tetapi tahun 2001 diperkirakan hanya tumbuh 7,8%. Padahal, semenjak otonomi, dana pemerintah yang mengucur ke Riau mencapai Rp 78 triliun lebih. Dana sebesar itu justru tidak menunjukkan adanya perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi, yang terjadi justru keadaan sebaliknya. Bila dikaitkan dengan aspek pemerataan, kenyataan pahit dan memilukan ini makin menguncang dada. Jika dikeluarkan peranan migas dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kontribusi Pulau Batam, maka bagian yang dinikmati masyarakat hanya tinggal 31%. Itu pun masih termasuk bagian dari sub-sektor kehutanan, perkebunan, jasa, dan angkutan. Sektor ini justru lebih banyak dinikmati oleh sekelompok orang saja. Bila penduduk Riau yang 42,46% di antaranya bekerja di sektor pertanian, maka paling banyak yang dapat mereka nikmati dari pertumbuhan ekonomi yang melambat tadi hanya berkisar 10%. Jumlah mereka dengan tingkat pendidikan SD ke bawah yang mencapai 63%, tentunya tidak akan mungkin menikmati “kue” ekonomi secara lebih besar. Seolah rakyat Riau sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Berdasarkan pengamatan BPS Riau, pertumbuhan ekonomi yang demikian dapat terjadi hanya ditopang oleh pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Artinya, hanya konsumsi pemerintah yang membuat ekonomi itu bergerak. Sedang ekspor dan investasi swasta belum. Sayangnya, dari dana Rp 7 triliun yang diperkirakan masuk ke Riau sebagai pengeluaran pemerintah yang melalui BPD hanya sekitar Rp 3 triliun. Ini berarti, ada pengurangan sebesar Rp 4 triliun lebih. Menyakitkan, dana sulit pula membuktikannya.

Rapor buruk ini, bila tetap diabaikan, maka memasuki tahun 2002 permasalahan akan bertambah besar. Pemberdayaan ekonomi rakyat



sebagaimana digembar-gemborkan, ternyata tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Dari Rp 75 miliar dana yang dianggarkan, ternyata hanya Rp 8 miliar yang terealisasi. Ini berarti, kinerja pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan modal murah hanya mencapai 10,7% saja. Lantas, masih adakah harapan di tahun 2002 mendatang? Bila diamati besarnya hutang luar negeri yang jatuh tempo sekitar bulan Mei 2002, implikasinya ke daerah adalah tidak mengucurnya dana perimbangan. Paling banter pemerintah pusat hanya menurunkan dana sesuai kebutuhan pembayaran gaji saja. Itu pun akan sangat disesuaikan dengan standar yang telah mereka tentukan. Keleluasaan untuk mematok keperluan anggaran sudah akan didasarkan pada standar belanja yang ketat. Bagi Riau, saat-saat kritis akan datang perlu kiranya dicermati secara arif. Masyarakat miskin yang sudah mampu mendapat informasi, namun belum dapat menterjemahkannya secara baik, akan mulai gerah dengan kondisi yang menghimpit. Bahkan pernik-pernik itu sudah mulai terlihat dari munculnya kerusuhan-kerusuhan massal dan perkelahian antara etnik.

Harapan membaik tetap saja ada, bila momentum otonomi daerah dan terbukanya peluang pasar bisa dapat dimanfaatkan dengan baik. Riau harus mengarahkan pembangunannya secara ter-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

fokus pada masyarakat lapis bawah. Konsumen lokal harus diangkat daya belinya melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Setiap pimpinan daerah harus jeli melihat mana sektor-sektor unggulan yang paling banyak terkait dengan kehidupan masyarakat. Bila ini tidak tersentuh, maka ketimpangan akan tetap tinggi dan kerawanan tetap akan menghantui.

Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, disiplin anggaran yang makin mengedepankan manfaat daripada sekedar menghibiskannya. Untuk ini, skala prioritas harus lebih diperketat ke arah perbaikan ruang gerak ekonomi masyarakat, ketimbang membangun “istana-istana megah” yang hanya dapat dilihat rakyat dengan perut yang melilit kosong.

Kedua, efisiensi yang berpijak pada kinerja dan produktivitas, sehingga setiap dana yang dikeluarkan mampu menjadi pendorong bergeraknya kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi ini bisa diterapkan, bila pemerintah daerah mampu menemukan titik-titik yang dapat memicu perbaikan ekonomi rakyat dan menstimulus dinamikanya, sehingga mereka terpacu untuk berkembang.

Ketiga, kemampuan men-*direct* semua sumber-sumber secara holistik dan tepat. Jangan sampai ada kebijakan yang bersifat parsial dan tidak punya kait kelindan satu sama lain. Keberhasilan dalam



melakukan koordinasi memang sangat tergantung pada siapa yang memegang komando. Masing-masing unit yang berfungsi sebagai penggerak, maupun penopang keberhasilan pencapaian kinerja harus tidak hanya mampu bekerjasama, tetapi juga harus dididik untuk dapat sama bekerja.

Keempat, pengawasan yang kontinyu yang dilandasi oleh kepentingan melakukan koreksi di masa yang akan datang. Bila tidak, mental-mental birokrasi yang korup selama ini, tetap saja akan menghantui keberhasilan pembangunan. *Nakhoda lengah, bahtera bisa berkecai*. Lebih parahnya lagi, jika malahan nakhodanya yang lebih berasyik ria melakukan pembocoran kapal.

Berpegang pada keempat arah kebijakan tersebut, Riau akan mampu menjadikan tahun 2002 ini sebagai tahun dasar dalam proses menuju Visi Riau 2020. Tidak perlu harus bernafsu mengejar pertumbuhan yang tinggi, tetapi ketimpangan makin menganga. Dalam proses yang wajar, ekonomi Riau dapat saja tumbuh mencapai 7,5% tahun 2002, asal perbaikan kebijakan diarahkan pada titik-titik yang selama ini menjadi faktor pengganggu.

Namun, beberapa faktor pengganggu harus juga diantisipasi. Beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mungkin akan mengalami kesulitan menghadapi gejolak ekonomi 2002, perlu di-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

aspadai agar tidak menjadi pemicu konflik horizontal, baik terbuka maupun secara tersembunyi.

Bila kerusuhan terjadi, maka alasan untuk tidak memenuhi kewajiban pada negara dan kreditor sangat mungkin dilakukan. Pemilik perusahaan dapat melenggang kemana-mana, sementara rakyat berantuk satu sama lain. Hasil kerja yang dicapai selama ini akan hancur sia-sia. Ini berarti, kata kunci untuk menapaki tahun 2002 adalah kerja keras, hemat, dan selalu waspada. ♦



LULUK AKAL TEPIAN MANDI

(Perebutan Lahan Perpustakaan Daerah untuk Bank Riau)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Salah satu ajaran yang pernah dikemukakan pemimpin besar China, Mao Tse Tung adalah bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan didalam. Dalam ajarannya kepada rakyat China salah satu yang disampaikan strategi menaklukkan musuh. Bila ingin menghancurkan suatu negara dengan segala peradabannya maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah menghancurkan perpustakaan dan laboratorium yang ada di negara tersebut.

Pada sisi yang berlawanan, ajaran ini secara filosofis mengandung makna, majunya suatu bangsa dengan peradaban yang dapat diandalkan sangat tergantung pada berkembangnya ilmu pengetahuan dan adanya pusat-pusat penggalian ilmu yang memadai. Belajar dari sejarah China masa lalu itu, maka umbangan antara temuan-temuan teknologi dan aspek-aspek kemanusiaan sebagaimana dikembangkan Adam Smith menjadi penting bagi kepentingan kemakmuran bangsa China mendatang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Sejarah Jepang setelah diluluhlantakkan bom atom di Hiroshima-Nagasaki, menunjukkan bukti bahwa kebangkitan masyarakat Jepang hanya bisa diperoleh melalui penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ada dua cara yang ditempuh Jepang, yakni menyekolahkan warganya ke berbagai perguruan tinggi ternama di seantero dunia dan menterjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dan menyebarkannya kepada masyarakat untuk dibaca dan dipahami. Transfer iptek terlaksana berkat fungsi dan peranan kepustakaan yang efektif dan optimal melayani masyarakat yang haus akan rasa ingin tahu dan memiliki motivasi tinggi untuk berkreasi dan manut terhadap peran kedisiplinan serta norma-norma kemanusiaan yang hakiki.

Malaysia yang dulu banyak berguru ke Indonesia memacu kemajuan masyarakatnya dengan pendidikan yang memadai. Perguruan tinggi yang dulunya banyak diisi oleh para dosen dari Indonesia kini ditempati oleh kader-kader muda yang berpendidikan doktor lulusan dari berbagai manca negara. Masyarakat Indonesia malah banyak yang saat ini menuntut ilmu ke sana. Setiap negara bagian mengembangkan pendidikan tinggi yang berupaya memenuhi taraf internasional. Tidak saja dengan tenaga pengajar yang berpendidikan baik dan gaji yang cukup, tetapi dengan perangkat-perangkat teknologi yang canggih. Bila masuk di



perputakaan perguruan tingginya, informasi yang serba *online* dan *instant* dapat dinikmati secara percuma.

Mahasiswa Malaysia sangat dimanjakan oleh kemudahan mengakses ilmu pengetahuan melalui perangkat multimedia yang tersedia di berbagai perguruan tinggi. Didukung oleh kemampuan berbahasa Inggris yang baik, jendela dunia terbuka lebar bagi mereka. Para raja di berbagai wilayah bertindak sebagai *counselor* bagi perguruan tinggi di wilayah kekuasaannya sehingga jaminan mendapatkan dukungan penguasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan memiliki legitimasi yang cukup. Termasuk sokongan dana negara bagian yang memang sangat penting bagi kelangsungan pelayanan yang optimal dan efisien oleh perguruan tinggi terhadap para pelajarnya. Semakin banyak masyarakat yang terpelajar maka semakin memungkinkan adanya peluang untuk masyarakat berkembang. Orang cerdik pandai dalam khasanah Melayu memang seharusnya menjadi tempat bertanya. Sehingga semakin banyak jumlah kaum terpelajar, maka semakin mungkin berbagai lapisan masyarakat menggantungkan harapan demi kemajuan. Orang Melayu bilang, "*Lubuk akal tepian mandi.*"

Di Indonesia pengalaman kolusi antara aparat pemerintah dan pemburu rente melakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penetrasi terhadap tidak saja kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga tatanan sosialnya telah menyebabkan wilayah Indonesia seperti ladang perburuan para kapitalis dan kroni-kroninya. Pengembangan Iptek hanya menjadi ajang masyarakat kampus dengan segala keterbatasan dan ketidaklengkapannya. Menyedihkan sekali bahwa upaya-upaya membekali masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan mencoba menemukan kemapanan pengetahuan malah dicurigai sebagai masyarakat yang anti pemerintah, merongrong wibawa negara, dan segala jargon negatif yang dilekatkan padanya.

Masyarakat ilmiah dikesampingkan karena melalui itu ada ancaman bagi keberlangsungan kekuasaan yang distorsif sekarang. Kenikmatan temporerak-porandakan kualitas umat manusia Indonesia oleh sekelompok kecil elit harus terus berlangsung dan karenanya proses pembelajaran dan perbaikan kualitas dan kapabilitas masyarakat tak perlu menjadi prioritas konkrit. Ia hanya layak dijadikan komoditas politik yang masih mujarab bagi perolehan suara.

Di Riau kenyataan paradoks seperti itu belakangan ini banyak muncul. Betapa terperanjatnya rakyat yang sedang dilanda musibah banjir ketika sang pejabat malah berencana membeli helikopter untuk berwira-wiri mengunjungi berbagai wilayah Riau. Ketika kemiskinan diteriakkan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penetrasi terhadap tidak saja kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga tatanan sosialnya telah menyebabkan wilayah Indonesia seperti ladang perburuan para kapitalis dan kroni-kroninya. Pengembangan Iptek hanya menjadi ajang masyarakat kampus dengan segala keterbatasan dan ketidaklengkapannya. Menyedihkan sekali bahwa upaya-upaya membekali masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan mencoba menemukan kemapanan pengetahuan malah dicurigai sebagai masyarakat yang anti pemerintah, merongrong wibawa negara, dan segala jargon negatif yang dilekatkan padanya.

Masyarakat ilmiah dikesampingkan karena melalui itu ada ancaman bagi keberlangsungan kekuasaan yang distorsif sekarang. Kenikmatan temporerak-porandakan kualitas umat manusia Indonesia oleh sekelompok kecil elit harus terus berlangsung dan karenanya proses pembelajaran dan perbaikan kualitas dan kapabilitas masyarakat tak perlu menjadi prioritas konkrit. Ia hanya layak dijadikan komoditas politik yang masih mujarab bagi perolehan suara.

Di Riau kenyataan paradoks seperti itu belakangan ini banyak muncul. Betapa terperanjatnya rakyat yang sedang dilanda musibah banjir ketika sang pejabat malah berencana membeli helikopter untuk berwira-wiri mengunjungi berbagai wilayah Riau. Ketika kemiskinan diteriakkan



dimana-mana maka isu itu menjadi secercah harapan yang selama ini memang sangat didambakan. Namun kekagetan kembali muncul pada saat sebuah rencana strategis disusun tidak satupun ada standar yang menunjukkan berapa persen masyarakat miskin yang akan dikurangi di Riau. Artinya persoalan-persoalan kemiskinan yang demikian kompleks yang membutuhkan penanganan secara komprehensif malah terlupakan dalam kerangka perencanaan pembangunan Riau.

Tidak lama berselang ketika isu kebodohan dikumandangkan aspek paradoks lain juga muncul. Secara budaya label bodoh yang dilekatkan pada masyarakat Riau sebenarnya sangat menyakitkan. Angka statistik memang menunjukkan betapa banyaknya masyarakat Riau yang hanya berpendidikan SD ke bawah. Tetapi prediket bodoh tentunya sangat sulit diterima meskipun salah satu indikatornya yakni strata pendidikan dapat membuktikan hal tersebut. Kata “bodoh” bermakna sangat kompleks yang tidak hanya ditinjau dari rendahnya tingkat pendidikan formal, tetapi lebih dari itu ia menunjukkan lemahnya akal dan fikiran serta budi pekerti. Dalam perspektif itu tentu hati masyarakat terasa liris karena meskipun pendidikannya rendah, tetapi ia tidaklah lemah dari akal dan fikiran apalagi budi pekerti sehingga prediket bodoh yang dilekatkan pada mereka belumlah pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

mpatnya. Justru menurut mereka banyaklah para sarjana dan orang terpandang, ter-masuk pejabat pemerintah dan para anggota legislatif yang memiliki strata pendidikan tinggi, tetapi justru lemah dari akal dan fikiran dan bahkan terlihat kurang memiliki budi pekerti.

Bagaimanapun upaya memberantas kebodohan sangatlah patut didukung. Sasarannya tentu saja bukan hanya mereka yang berpendidikan rendah, tetapi mereka yang berpendidikan tinggi dan lemah akal dan fikiran serta rendah budi pekertinya harus pula terlingkup di dalamnya. Secara bersama masyarakat Riau harus menyadari dan belajar dari sejarah bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk itulah sebenarnya sebuah perpustakaan yang komprehensif dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang canggih sangat dibutuhkan. Ini berarti upaya penggusuran perpustakaan Riau oleh kroni-kroni kapitalisme sangat bertentangan dengan semangat memberantas kebodohan. Justru yang seharusnya dilakukan adalah mempercanggihnya sehingga ia bisa menjadi sumber pembelajaran dan penuluran lptek bagi masyarakat Riau.

Pemerintah Riau seharusnya tidak menekankan sisi negatif dari ajaran Mao Tse Tung. Memberangus perpustakaan berarti menghancurkan suatu bangsa dan peradabannya. Sisi positif dari ajaran itu yang harus dipetik, bahwa memajukan



suatu bangsa dan suatu kaum harus didukung oleh pengembangan Iptek yang memadai. Sumbernya ada di perpustakaan dan laboratorium. Masyarakat ilmiah Riau secara khusus sebenarnya sangat membutuhkan adanya perpustakaan yang *online* dan dilengkapi berbagai fasilitas internet yang mudah diakses. Berbagai situs di dunia maya saat ini memberikan berbagai suguhan pengetahuan secara percuma. Termasuk perkembangan tekh-nologi terkini yang mudah di *-download* untuk diterapkan di tengah masyarakat serta informasi produk, baik oleh pembeli maupun penjual sebagai ajang transaksi modern (*e-commerce*).

Lantas kemana Bank Riau harus diusung? *Pertama*, tidak lain adalah ke dunia maya. *Email Banking* saat ini bukan lagi sesuatu yang dapat ditunda. Orang tidak butuh kantor yang besar. Dalam sebuah *handpone* genggam semua transaksi bisnis dapat diatur dengan mudah. Termasuk berbagai transaksi keuangan. Perbankan memanjakan *customer*-nya dengan berbagai layanan *digital* dan *mobile*. Bank Riau perlu berfikir keras mengubah tradisional *approach*-nya pada cara-cara yang lebih canggih. Kedekatan dengan pasar global menuntut hal itu secara mutlak.

Kedua, pemisahan *head-office* dengan *branch-office* secara jelas. Sebaiknya kantor pusat dipisahkan dengan kantor cabang utama agar pelayanan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

nasabah dapat dilakukan secara cepat. Kantor kas perlu diperbanyak sehingga penyebaran pelayanan nasabah dapat dilakukan. Hanya saja itu harus *online* mengingat transaksi bisnis saat ini membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan memuaskan. *Ketiga*, membersihkan Bank Riau dari pegawai-pegawai yang korup dan meningkatkan profesionalisme semua karyawan sebagai tenaga perbankan yang handal dan siap menghadapi masa depan yang kompetitif.

Trade-mark perbankan sekarang tidak diukur dari kemegahan kantor, tetapi pada kualitas pelayanan pada masyarakat nasabah dan calon nasabah. Kita memimpikan Bank Riau yang terpercaya, bisa diakses dimana dan kapan saja. Kita ingin bangga memiliki *Card Bank Riau* yang dapat digunakan di dunia bisnis manapun. Bukan hanya sekedar bank penampung kas Pemda apalagi tukang berangus perpustakaan demi proyek pembangunan perkantoran. Semoga Bank Riau tidak terjebak oleh kepentingan-kepentingan elit yang distorsif secara bisnis dan ekonomi. ♦



DAYUNG SERENTAK, UNTUNG SEREMPAK

Memilih Pemimpin yang “Core Competence” di Riau)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Banyak bakal calon gubernur (Balongub) yang sudah dilansir media massa untuk memimpin provinsi ini di masa datang. Semua nama pada dasarnya memiliki kelebihan masing-masing, dan karena itu pula mungkin masyarakat ada yang mencalonkan mereka. Beberapa di antaranya ada yang telah menyampaikan pemikiran tentang aspek membangun masyarakat Riau pasca Soeripto yang dinilai kurang berhasil mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat.

Hal yang menarik untuk dicermati dari pemikiran yang masuk adalah diskusi seputar visi dan misi. Disyaratkan seorang gubernur nantinya haruslah orang yang memiliki visi ke depan dan misi yang jelas, sehingga Provinsi Riau dapat berkembang dengan baik. Jika direnungkan lebih dalam mungkin di situ letak kelemahan dari pemikiran tersebut.

Visi dan Misi Riau sebenarnya sudah sangat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



klas dan tegas. Sebagai bagian integral dari NKRI, maka Visi dan Misi Provinsi Riau tidak dapat lepas dari apa yang dikehendaki bangsa ini. Dalam pembukaan UUD 1945 secara konkrit dicantumkan Indonesia ingin mengantarkan masyarakatnya pada kehidupan yang berkesinambungan, baik material dan spritual, dunia dan akhirat. Karena itu, misi yang diemban dari keberadaan bangsa Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya dan membentuk negara kesatuan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Jadi, jika Provinsi Riau masih dalam lingkup NKRI, maka visi dan misi itu yang harus diemban. Caranya dengan menyusun strategi dan program yang mampu diimplementasikan untuk mencapai visi dan misi yang dimaksud. Bukannya mencari visi dan misi lain yang belum tentu lebih baik. Apalagi mencari orang yang memiliki visi dan misi lain, yang tentunya memiliki keteladanan dari apa yang sudah ada sekarang. Ini berarti, pertanyaan yang amat penting dalam kerangka pemilihan Gubernur Riau mendatang bukanlah seputar visi dan misi baru, tetapi adalah siapa dari Balongub yang sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



menuntut saat ini, yang diperkirakan mampu menerjemahkan visi dan misi yang sudah ada ke dalam suatu strategi yang jitu dan mengakomodasi kompetensi inti (*core competence*) yang dimiliki provinsi ini untuk menyusun dan mengimplementasikan program yang sejalan dengan strategi yang sudah ditetapkan. Terutama sekali dihadapkan pada tatanan kehidupan global yang berubah cepat.

Tatanan Kehidupan Global

Memasuki masa transisi era milenium ketiga dengan karakteristik interdependensi ekonomi yang tinggi, arus informasi yang deras, dan percepatan perubahan teknologi serta alam keterbukaan, meskipun dalam keadaan “sakit parah” karena krisis ekonomi dan kepercayaan, Provinsi Riau harus memperhatikan tatanan kehidupan global agar dapat berperan dan sukses. *Pertama*, organisasi provinsi ini harus dibuat lebih mapan dengan rancangan strategi yang konsisten dan pola manajemen yang berbudaya.

Selama ini organisasi bangsa ini (termasuk Riau) sangat konvensional yang mengarah pada *bureaucratic* atau *hierachical organization* yang bersifat kaku dan cenderung memperlakukan rakyat seperti “budak jajahan”. Mematikan kreativitas dan inovasi serta *enterpreneurship* SDM karena segala aktivitas dan tindakan harus dikontrol melalui



prosedur dan perintah atasan.

Kedua, Provinsi Riau harus menjadi lembaga yang cermat memperhatikan perubahan dan sebagai *corporate citizen* yang mampu mengenali kebutuhan dan keinginan segenap lapisan masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan provinsi ini. Menjawab tantangan ini harus diciptakan *build in* fleksibilitas organisasi pemerintahan supaya proaktif beradaptasi dengan perubahan yang cepat, tanpa kehilangan identitas melalui pemanfaatan *core competence* yang dimiliki.

Daya Saing Berkelanjutan

Jika berjalan sebagaimana baiknya, maka pasca reformasi bangsa Indonesia akan berada pada alam demokrasi, keterbukaan dan berhadapan dengan tatanan kehidupan masyarakat global. Muaranya adalah makin menajamnya persaingan, sementara masyarakat sedang terpuruk dalam krisis perekonomian. Untuk itulah pemerintah dituntut mampu mengkristalisasi *core competence* daerah ini, sehingga rakyatnya memiliki daya saing yang berkelanjutan (*sustainable competitive advantage*) agar tidak lagi seperti “*Ayam yang mati dilumbung padi*”. Ada tiga bentuk *core competence* yang menghasilkan daya saing berkelanjutan, di mana provinsi ini harus mampu menggerakkannya.

Pertama, kita bersyukur pada Tuhan Yang



Maha Esa bahwa negeri ini punya sumberdaya fisik (*physical capital*) yang melimpah. Lebih dari itu kita perlu mendukung gerakan reformasi di daerah ini yang telah berjuang gigih agar sumberdaya fisik (terutama minyak bumi) itu dapat kita miliki dan memanfaatkan dalam arti yang sesungguhnya. Ini berarti, gubernur mendatang hanya perlu mengaplikasikan sumber-sumber tersebut dengan strategi dan program implemementasi pembangunan yang berkualitas yang akan dilaksanakan di provinsi ini. Sektor penting yang perlu diperbaiki infrastruktur yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, bukan mempercantik kantor-kantor pemerintah yang justru melahirkan inefisiensi.

Kedua, sumberdaya organisasi (*organization capital*) yang lebih luwes dan tanggap terhadap perkembangan masyarakat. Organisasi pemerintah harus lebih diarahkan menjadi *enterpreneurial government* yang tidak “menggerogoti” sumber daya lain, apa lagi rakyat. Untuk itu peran dan fungsi setiap lembaga harus dilakukan pada posisi yang sebenarnya. Artinya, semua lini organisasi harus didorong menjadi SBU (*Strategic Business Unit*) yang efisien dan produktif berpegangan pada prinsip “*Dayung Serentak*” bahtera provinsi ini, agar mendapat “*Untung Serempak*” bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Ketiga, sumberdaya manusia (*human capital*) Provinsi Riau sangat tertinggal. Masih rendahnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Qualitas SDM sebagian besar masyarakat Riau tidak dapat dipungkiri, tetapi bukan tidak ada yang dapat dimanfaatkan dari mereka. Filosofi manajemen Riau sudah lama mengatakan, “*Sibuta untuk meniup esung (tempat menumbuk padi) dan Sipekak untuk menyulut Cagak (meriam).*”

Proses kristalisasi *core competence* dalam bentuk SDM di Provinsi Riau memang merupakan faktor kunci. Dalam khasanah manajemen jenis kompetensi ini memang memiliki daya saing (*competitive advantage*) yang tinggi. Karena itu, konfigurasi ketiga *core competence* di atas harus mampu mendorong semakin ke depannya kompetensi SDM. Pemanfaatan sumberdaya fisik dan reformasi total proses struktur semua lini organisasi di Provinsi Riau (ke arah yang fleksibel terhadap tatanan kehidupan global) di samping mampu mengakomodasi sifat *intellectual human capital* harus pula menjadi pendorong bagi lahirnya sifat-sifat tersebut.

Gubernur Riau Mendatang

Akhirnya mengingat banyaknya calon yang dimunculkan masyarakat, kiranya DPRD dan siapa saja yang terkait dengan pemilihan Gubernur Riau pasca Soeripto, ada baiknya memperhatikan beberapa simpulan dari uraian di atas. *Pertama*, gubernur hendaknya orang yang mampu menterjemahkan visi dan misi bangsa ini ke dalam bentuk strategi



dan program implementasi pembangunan di Provinsi Riau. Kedua, proses transformasi struktur organisasi pemerintah dari *bureaucratic government* ke *entrepreneurial government* sangat mendesak agar provinsi ini mampu menghadapi tatanan kehidupan global.

Terakhir, tiga jenis *core competence* yang diperlukan agar provinsi ini memiliki daya saing berkelanjutan (*sustainable competitive*) adalah sumber daya fisik, sumber daya organisasi, dan SDM. Seorang gubernur mendatang di samping harus mampu mengakomodasi tiga jenis *core competence* tersebut dan menggunakannya secara cermat dan akurat juga harus memiliki komitmen yang tinggi dan jujur untuk melahirkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Bukannya orang yang menjadikan lembaga pembinaan SDM sebagai batu loncatan untuk mengejar ambisi dan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. ♦

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



UDUK MERAUT RANJAU, EGAK MENINJAU JARAK

(Ketergantungan Ekspor Riau pada Singapura)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Ketertinggalan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak hanya dapat diselesaikan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya pada skala lokal. Peran perdagangan selama ini telah diyakini sebagai solusi bagaimana keberagaman peran dan ketersediaan sumber-sumber dapat diramu dan dipertukarkan secara ekonomis dan harmonis sehingga mampu menaikkan kesejahteraan. Keunggulan komparatif satu wilayah atau negara dibandingkan dengan wilayah lain atau negara lain memberi peluang untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan lainnya.

Memproduksi sebuah barang bisa jadi tidak efisien sehingga lebih baik membeli. Sebaliknya jika memproduksi lebih optimal sementara pihak lain lebih ekonomis untuk membeli. Dalam khashah tersebut terbitlah pertukaran yang dalam



tataran normatif menuju kepada keseimbangan pasar untuk menghasilkan tingkat efisiensi yang optimum.

Sejalan dengan berkembangnya peradaban dunia maka perkembangan transaksi antar negara tidak saja dilakukan oleh institusi negara tetapi juga pihak swasta. Bahkan dalam era yang serba canggih saat ini keterbukaan pasar semakin meluas. Lalu lintas perdagangan internasional menjadi sangat ramai. Masing-masing negara dan pelaku bisnis di dalamnya mencari keunggulan demi keunggulan untuk memenangkan kompetisi global yang makin tajam.

Dalam formulasi pertumbuhan ekonomi peranan perdagangan internasional menjadi sangat dominan disamping investasi dan konsumsi. Seli-sih antara kinerja ekspor dengan impor akan menjadi penentu ketahanan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara serta eksistensinya dalam percaturan internasional. Menguasai pasar ekspor yang dominan akan memberi dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat tempatan. Oleh karenanya ketergantungan ekspor pada satu komoditas dan pasar tertentu akan membawa dampak pada ketidakeleluasaan kinerja ekonomi suatu wilayah.

Di Riau perkembangan ekspor ternyata tidak menggambarkan kontribusi yang mampu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

menaikkan kekuatan ekonomi rakyat. Meskipun ekspor Riau (khususnya non-migas) meningkat, namun sangat tidak beragam. Bila tahun 2001 total ekspor non-migas Riau baru sebesar US\$ 5,739 juta maka pada tahun 2002 naik menjadi US\$ 6,560 juta dan tahun 2003 naik lagi menjadi US\$ 6,755 juta. Hanya saja sebagian besar tujuan ekspor non migas Riau adalah ke negara-negara Asia khususnya Singapura dan sangat terbatas lini produknya.

Pada tahun 2001 *share* ekspor non-migas Riau ke negara-negara Asia adalah sebesar 88,37% dengan porsi Singapura mencapai 66,85% dari total ekspor Riau. Pada tahun 2002 meskipun ekspor ke negara-negara Asia turun menjadi 85,64%, tetapi porsi ekspor ke Singapura mengalami kenaikan sehingga menjadi 68,08%. Pada tahun 2003 porsi ekspor Riau ke Singapura naik lagi menjadi 68,67%. Hal ini sejalan dengan kenaikan porsi ekspor Riau kenegara ASEAN yang pada tahun 2003 mencapai 73,99%. Sebahagian besar negara tujuan ekspor Riau memang hanya tertuju ke Asia. Pada tahun 2003 porsinya mencapai 91,35%. Pasar Eropa hanya mendapat pangsa sebesar 6,74% dan Amerika hanya 5%.

Ketergantungan ekspor ke Singapura akan menyebabkan *bargaining position* bisnis Riau terhadap negara tersebut menjadi lemah. Nilai tambah yang dapat dinikmati oleh para eksportir akan



sangat tergantung pada keleluasaan para importer Singapura memainkan peranan bisnisnya. Apalagi bila komoditas yang diekspor adalah barang-barang mentah yang nilai jualnya relatif rendah dan resiko bisnisnya tinggi. Pengalaman pemasaran sayur daun lebar membuktikan bagaimana pasar Singapura merupakan pasar berpotensi tetapi tidak layak bagi eksportir sayur Riau. Kalah bersaing dalam kualitas produk dan kemampuan menyelaraskan keinginan dan kebutuhan konsumen akan ditekan oleh posisi pasar yang tidak menguntungkan. Kerugian akan tetap berada pada para eksportir Riau mengingat perilaku pasar sangat sensitif terhadap harga sehingga implikasinya terhadap kemampuan menutup biaya menjadi rendah. Ujung-ujungnya adalah ketidakmampuan memperoleh keuntungan dan terganggunya kesejahteraan petani sebagai produsen.

Dilihat dari jenis komoditas yang diekspor maka porsi terbesar adalah alat-alat listrik sebesar 31,99% dan Pulp kertas 10,11% serta minyak sawit 8,33%. Nilai ekspor alat-alat listrik pada tahun 2001 mencapai US\$. 1.835.840.000,- hanya mengalami kenaikan relatif kecil pada tahun 2002. Porsi ekspor komoditas ini pada tahun 2002 menyusut menjadi 28,03%. Porsi ekspor yang meningkat pada tahun 2002 adalah pulp kertas (10,30%) dan minyak sawit (12,57%). Sedangkan pada tahun 2003 ekspor alat-alat listrik porsinya kembali mem-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

besar yakni 32,93%. Minyak sawit sebesar 16,08% dan Pulp Kertas porsinya sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 2003 porsi nilai ekspor ketiga komoditas ini mencapai 57,75% dari total nilai ekspor Riau.

Gambaran ini mengindikasikan diversifikasi komoditas ekspor Riau sangat terbatas. Ekspor sangat tergantung pada tiga komoditas utama, yakni alat-alat listrik, pulp kertas, dan minyak sawit. Ketiga komoditas tersebut merupakan produk-produk yang banyak dihasilkan perusahaan-perusahaan besar. Berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat belum banyak tersentuh oleh kegiatan ekspor. Alat-alat listrik pada umumnya dihasilkan oleh industri yang ada di Pulau Batam, sedangkan Pulp Kertas adalah hasil produksi perusahaan-perusahaan besar yang ada di Riau seperti IKPP dan RAPP.

Kedua komoditas ini kurang bersentuhan dengan kegiatan ekonomi masyarakat di sektor hulunya. Minyak sawit merupakan produk yang bersentuhan dengan beberapa komponen masyarakat. Namun demikian dominansi perusahaan-perusahaan perkebunan besar menyebabkan kinerja ekspor hanya akan signifikan bagi para konglomerat ketimbang masyarakat kecil di pedesaan. Kenaikan harga TBS memang sangat mempengaruhi kesejahteraan petani sawit Riau tetapi data



menunjukkan lebih kurang 80% lahan sawit dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar dengan performa pasar yang monopsonis.

Untuk meningkatkan kinerja ekspor Riau dimasa datang perubahan orientasi ekspor mutlak diperlukan. *Pertama*, peluang-peluang pasar selain Singapura harus diantisipasi sehingga ketergantungan terhadap satu negara tujuan ekspor dapat dikurangi. Pasar Eropa di luar negara-negara MEE merupakan peluang yang cukup menjanjikan. Geliat ekonomi Eropa Timur yang mulai menerapkan pasar terbuka merupakan kesempatan untuk mendapatkan pasar bagi berbagai komoditas yang diproduksi Riau. *Kedua*, diversifikasi produk guna menjamin kelangsungan ekonomi masyarakat. Mengalakkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi barang-barang berorientasi ekspor mutlak diperlukan. Investasi terhadap industri hilir komoditas primer harus dipercepat dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar manca negara.

Ketiga, keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) komoditas ekspor Riau harus terhindar dari perilaku pasar yang monopsoni sehingga kerugian masyarakat selaku produsen ter Hulu yang pada umumnya merupakan produk-produk sektor primer dapat diminimalisir. Untuk itu diperlukan adanya keberagaman institusi bisnis yang eksis dalam salah satu komoditas tertentu dimana peme-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

intah diharapkan mampu menjadi motivator sekaligus wasit yang adil untuk menjamin tidak terjadinya distorsi pasar yang hanya menguntungkan para pemburu rente.

Keempat, membuka informasi pasar ekspor seluas-luasnya kepada masyarakat dan mengarahkan kemampuan mereka untuk menangkapnya. Penyediaan infrastruktur ekonomi guna menumbuhkan gairah investasi terhadap komoditas ekspor sangat diperlukan. Akses informasi tanpa adanya motivasi untuk menggunakan informasi tersebut sebagai basis bisnis yang *profitable* tidak akan membawa hasil yang memadai. Melalui Master Plan pengembangan ekspor Riau yang holistik dapat diterjemahkan peranan instansi-instansi lain dalam mendukung berkembangnya ekspor Riau yang lebih *profitable*, berkait dengan kesejahteraan masyarakat, dan berkesinambungan.

Tanpa itu, masyarakat Riau hanya akan mampu gigit jari terhadap perkembangan pasar global yang pada dasarnya sangat menggiurkan. Menghadapi persaingan yang makin tajam tidak ada lagi kesempatan untuk berleha-leha. Keberhasilan Riau ke depan hanya mampu diraih oleh orang yang mau apa yang dikenal dalam budaya Melayu, *“Duduk merant ranjau, tegak meninjau jarak.”* Hanya pekerja keras yang tidak mau membuang waktulah yang akan sukses dalam percaturan ekonomi global saat ini dan masa datang. ♦



RAJA BUNCIT KEDEKUT

(Fenomena Pemimpin dan Masyarakat di Era Reformasi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Bagai berita yang dilansir media massa, baik cetak maupun elektronik tidak saja membuat bulu kuduk kita merinding tetapi ada hal-hal aneh yang kini terjadi di Indonesia. Secara akal sehat sulit dipercaya semua itu dapat terjadi. Tetapi, itulah yang sedang berlangsung. Setiap hari masyarakat disuguhi peristiwa-peristiwa menarik dan mencengangkan yang terjadi di sekitar mereka. Itu bukan impian atau khayalan. Realita menunjukkan hal-hal yang dulu dianggap tidak mungkin kini menjadi mungkin terjadi.

Pada tataran nasional, kasus Akbar Tanjung menyeret akal dan pikiran masyarakat tentang betapa tidak berartinya hukum di Indonesia saat ini. Bagaimana mungkin orang yang telah ditetapkan bersalah oleh majelis hakim malah mewakili bangsanya di kancah internasional. Pengamat dan media asing mencemooh. Menganggap hal itu merupakan tindakan yang sangat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Repository of Universitas Riau
https://repository.uniriau.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Universitas Riau



yang seharusnya melindungi rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku malah saling baku tembak tanpa memperhatikan sedikit-pun ketentuan hukum. Sedihnya, peristiwa itu malah dipicu oleh persoalan narkoba yang seharusnya di perantas secara hukum.

Rakyat tidak lagi dapat membanggakan tentara dan polisi mereka sebagai pahlawan bangsa dan penegak hukum. Citra tentara dan polisi saat ini dibangun oleh perilaku-perilaku mereka yang justru memperburuk citra itu sendiri. Rakyat mengenang tentara dan polisi saat ini bukan lagi sebagai pembela negara dan penegak kebenaran, tetapi sebagai pembeking judi, narkoba, dan prostitusi. Termasuk kegiatan-kegiatan yang merugikan negara lainnya seperti penyeludupan, *illegal logging*, penjarahan, dan lain-lain. Bahkan rakyat yang tidak berdosa menjadi korban dari perkelahian mereka dalam berebut lahan maksiat yang seharusnya mereka berantas.

Pada tingkat kejaksaan sekarang ini marak pula berbagai isu ketidakwajaran yang mencegangkan. Bahkan pada level tertinggi (Jaksa Agung) persoalan ketidakwajaran tersebut mengemuka dengan lakon yang amat memalukan. Harta siluman yang diperdebatkan hanyalah memberi sembilu nan pedih pada rakyat yang sedang dihimpit krisis multidimensional. Para



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pengungsi yang menahan pedih di Nunukan (Kalimantan Barat) tentunya sangat terpukul oleh berita tentang para pembesar negara yang penuh dengan para pencoleng.

Saat ini persoalan moral bangsa menjadi sulit dibangun. Anak bangsa tidak lagi segan-segan melakukan hal-hal yang sudah di luar perikemanusiaan. Seorang yang diduga mencuri harus menerima hukuman yang sangat bringas dari masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang harus menerima hukuman yang tidak setimpal dengan apa yang harus mereka terima. Tanpa proses yang jelas mereka dihakimi massa secara brutal. Dipukuli hingga tewas dan bahkan dibakar hidup-hidup seperti seekor binatang yang tidak perlu dipertimbangkan harkat manusianya. Masyarakat Indonesia seperti gampang marah, mengamuk dan cenderung melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbau anarkis tak terkendali. Negara seperti tidak lagi memiliki hukum yang harus dipatuhi.

Fenomena yang terjadi antara negara dan rakyat pasca reformasi ini memang menarik untuk direnungkan. Apakah rakyat masih punya negara? Dan lebih ekstremnya apakah Indonesia ini masih memiliki rakyat? Aparatur negara bukannya tambah membaik. *Good government* yang diharapkan malah menjadi alat bagi berbagai oknum aparat untuk saling meniadakan satu dengan lainnya.



Fitnah dan perasaan saling curiga tumbuh dalam keseharian pejabat birokrasi. Namun demikian penjarahan mereka terhadap uang rakyat tidak mengecil. Pengabdian bukan lagi menjadi dasar perilaku yang melahirkan pelayanan yang prima. Pengendalianlah yang dipakai sebagai alat untuk mempertegas penguasaan terhadap asset-asset negara yang justru meluluhlantakkan pelayanan terhadap masyarakat.

Pengelola negara menjadi loba dan tamak sehingga mereka lebih memperdulikan upaya menghamburkan harta rakyat. Dalam istilah Melayu para pemimpin seperti ini disebut sebagai "*Raja Buncit Kedekut*". Pemimpin yang loba dan tamak serta sangat kikir terhadap rakyatnya. Ia hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kroninya untuk menambah dan memupuk kekayaan melalui cara yang tidak terpuji dan sangat merugikan umat.

Tidak adanya keserasian antara rakyat dan negara muncul karena para pengelola negara tidak lagi meletakkan prinsip-prinsip pengelolaannya pada aturan main yang benar. Untuk itu ke depan di Indonesia diperlukan adanya upaya kongkrit menumbuhkan kembali perasaan berbangsa dan berkeadilan yang dilandasi oleh peradaban hakiki umat manusia. *Pertama*, melalui pemutahiran kembali cara-cara pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip universal keagamaan. *Kedua*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



membangun sebuah kesepakatan nasional untuk menuju suatu kondisi Indonesia masa depan yang lebih baik.

Ketiga, menemukan berbagai aturan hukum yang memihak pada kepentingan rakyat dan mengimplementasikannya secara konsekwen. Sekaligus memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran. *Keempat*, memberdayakan institusi-institusi masyarakat paling bawah dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk mampu memainkan peranan dalam menjaga keutuhan dan pelaksanaan kerangka hukum yang jelas dan tegas. *Kelima*, menjaga tidak terjadinya distorsi ekonomi dan ketidakseimbangan yang dominan dari kepemilikan asset ekonomi dalam masyarakat dengan mengembangkan rasa saling mengisi dan kesetiakawanan yang tinggi. Kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat eksklusif harus dihindarkan untuk mengurangi adanya kecemburuan sosial yang tinggi sebagai pemicu kerawanan.

Keenam, menata ulang aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dengan mengedepankan prinsip kepatutan dan kemungkinan sesuatu dikerjakan dan dilakukan. Pembangunan dilaksanakan tidak hanya dalam perspektif para pejabat, tetapi lebih didekati dari aspek peluang rakyat untuk memperbaiki kehidupannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Ketujuh, mencari titik-titik dimana kesejahteraan rakyat dapat diangkat dan lebih diberdayakan secara baik. Penyediaan infrastruktur dasar dengan kualitas yang memadai menjadi kunci dari upaya-upaya pemberdayaan rakyat. Alokasi anggaran yang jelas terhadap masalah ini mutlak diperlukan.

Kedelapan, perhatian yang serius terhadap masalah pendidikan harus dilakukan sesegera mungkin. Mulai dari tingkat paling bawah sampai paling tinggi. Tidak hanya masalah prasarana, tetapi juga masalah prosesnya harus ditata ke arah proses yang mampu melahirkan sumberdaya manusia yang unggul karena ketrampilan dan jati dirinya. Keberadaan manusia beradab menjadi kunci terselenggaranya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkesinambungan. ♦

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



MENANGGUK DI AIR KERUH

Mengembalikan Lokomotif Reformasi di Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Masyarakat sangat terkejut ketika tersiar berita Kabinet Reformasi berhasil “menilep” uang negara sebesar Rp. 1,7 triliun dalam waktu yang relatif pendek. Seolah-olah mereka “*Menangguk di air keruh*” dengan label reformasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin pudar sejalan dengan tidak terselesaikannya berbagai kasus kerusuhan di Indonesia. Termasuk “plintat-plintutnya” soal likuidasi perbankan. Lebih mencengangkan lagi, privasi seorang presiden sudah dapat ditembus secara gamblang. Bocornya pembicaraan telepon Habibie-Ghalib menunjukkan rapuhnya pemerintah Indonesia sekarang.

Warna reformasi memang telah berubah, karena berbagai kepentingan pribadi telah dikedepankan. Semua orang ingin menjadi reformis dan banyak yang memanfaatkannya untuk memuaskan kebutuhannya, mumpung kesempatan berteriak terbuka lebar. Contoh yang amat menggelitik ada-



lah ketika mahasiswa Riau berduyun-duyun datang ke kantor DPRD.

Sebelum Soeharto turun, sumbangan Indomie datang dengan kardus tanpa nama. Setelah Soeharto dapat dilengserkan kardus Indomie yang datang sudah lengkap dengan nama dan alamat pengirim. Sangat mudah ditebak oleh mahasiswa ketika itu, bahwa “begajul udik” yang bersangkutan ingin dipandang sebagai kaum reformis sejati walaupun sebelumnya orang tahu ketika pemerintah Soeharto berkuasa ia adalah koruptor tulen.

Malang bagi gerakan mahasiswa Riau yang selanjutnya berjuang untuk kepentingan pembelaan hak-hak masyarakat. Mereka terkontaminasi oleh proses suksesi gubernur yang terjadi di Riau. Mahasiswa Riau terjerembab ke dalam permainan politik para pendukung kontestan peserta suksesi. Pengalaman politik yang kurang mendalam dari beberapa tokoh mahasiswa menyebabkan mereka mudah terbius oleh “angin segar” para pemain politik.

Mahasiswa yang sedang terlena dengan keberhasilannya melengserkan Soeharto menjadi terkotak-kotak, bahkan berhadapan satu sama lain. Sebab mereka berhasil diinfiltrasi oleh kepentingan politik suksesi. Bukti konkretnya adalah hancurnya kantor SMPT-Unri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Muara dari semua itu adalah melemahnya gerakan mahasiswa Riau pada hal-hal yang sangat prinsipil bagi kepentingan daerah. Konsolidasi semakin sulit dilakukan, karena saling curiga satu sama lain menjadi dominan. Pada tahap selanjutnya mahasiswa kalah cepat dengan reformis-reformis dadakan. Ditunjang oleh masa libur kuliah, gerakan mahasiswa semakin “melempem”. Perjuangan hak-hak masyarakat Riau, khususnya tuntutan bagi hasil minyak, hanya dilakukan oleh sebagian kecil kelompok mahasiswa yang memang masih mau peduli. Pada bagian lain, perjuangan diambil alih oleh kelompok reformasi yang menamakan diri sebagai gabungan kekuatan masyarakat Riau.

Tidak tanggung-tanggung, usulan langsung disampaikan ke Presiden dan DPR-RI. Janjipun diperoleh, masyarakat Riau akan diberitahukan hasilnya dalam waktu yang relatif singkat. Namun, sampai batas waktu yang telah ditentukan “durian belum jua runtuh”. Isu pemberontakan pun ditebar. Gerakan mendatangkan 1000 ulama bersorban ke PT. CPI dicanangkan.

Tanpa mengurang rasa hormat pada gabungan pejuang-pejuang reformasi tersebut, hasil tuntutan bagi hasil SDA Riau sebesar 10 persen tampaknya “masih jauh panggang dari api”. Entah “mengecyek”, akhirnya Bappenas mengeluarkan



statement yang amat menyakitkan, yakni masyarakat Riau hanya pantas “disangoni” sebesar Rp. 600 miliar setiap tahunnya. Ini dibuktikan mereka dengan menaikkan jatah Riau menjadi Rp. 756,547 miliar pada tahun anggaran 1999/2000. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 90,901 miliar. Di masa depan, tuntutan 10 persen bagi hasil eksploitasi SDA untuk Riau nampaknya akan makin kabur. Sejalan dengan akan diselenggarakan Pemilu, maka masyarakat Riau kembali akan terkotak-kotak ke dalam partai mereka masing-masing.

Kalau keanekaragaman tersebut manghailkan kesatuan perjuangan, maka akan sangat produktif bagi kepentingan daerah, tapi bila yang terjadi hanya perbedaan yang mengarah pada perpecahan gerakan, masyarakat Riau akan semakin melemah. Substansi tuntutan hanya akan menjadi komoditas politik untuk kepentingan mencari suara masyarakat.

Agar perjuangan masyarakat Riau untuk memperoleh 10% hasil produksi SDA yang dieksploitasi di wilayahnya tidak sekedar “menggantung angin”, maka pola gerakan haruslah diubah. Gerakan yang hanya mirip “klompencapir ala Harmoko”, tidak mungkin akan berhasil. Mengutus wakil-wakil ke Istana Presiden lebih mirip degan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Upaya Tutut membawa suku Asmat menghadap Bapaknya untuk memamerkan Koteka ke manca-negara”. Masyarakat Riau harus menyadari sepe-uhnya arti dan esensi gerakan mahasiswa, jika tuntutananya ingin berhasil baik.

Sudah saatnya “lokomotif reformasi” di-embalikan ke tangan mahasiswa. Para reformis dadakan dan para “bunglon” yang selama ini me-rasa lebih reformis, harus beralih peran menjadi pendamping atau bahkan minggir sama sekali. Jika masih ingin terlibat yang terbaik adalah menjadi dalang dan bantalan bagi bergeraknya lokomotif refor-masi mahasiswa.

Upaya mengkonsolidasikan mahasiswa untuk secara gigih memperjuangkan kepentingan masyarakat Riau memerlukan tokoh panutan, bukan tokoh yang mengambil alih peran mereka dengan “sambung rasa ala Soeharto”. Kemauan politik pemerintah daerah harus menjadi bahan bakar bagi gerakan lokomotif tersebut.

Terminal yang dituju oleh lokomotif refor-masi ini, tentunya bukan Presiden Habibie (yang keberadaannya di Istana Negara saat ini seperti di ujung tanduk), tetapi perusahaan-perusahaan yang selama ini telah mengeksploitasi hasil bumi Riau. Termasuk secara intensif menggugat keberadaan Kota Batam sebagai “lambang pelecehan” mas-yarakat Riau.



Untuk itulah, kesadaran moral para mahasiswa harus kembali ditumbuhkan dan dikonsolidir mengingat kebutuhannya sudah sangat mendesak. Banyak orang berharap mahasiswa tetap independen dan berjuang melalui cara mereka sendiri, tanpa harus terimbas oleh percaturan politik yang terjadi selama ini.

Sejarah Indonesia telah berkali-kali membuktikan bahwa gerakan moral mahasiswalah yang mampu menumbangkan tirani kekuasaan dan *status quo* pemerintahan masyarakat. Rakyat Riau, tentunya menunggu “geliat” mahasiswa dan sekali lagi menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan riil di masyarakat. Bukan terlena oleh “sumbangan biji kacang kedelai”. ♦

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



BAGAI SI KUDUNG MENDAPAT CINCIN

(Riwayat Sektoral Pembinaan UKM)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia telah memberi warna tersendiri bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kalaupun tidak dapat dikatakan melenceng dari apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, banyak pakar dan masyarakat umum mulai merasakan bahwa hasil yang telah dicapai selama ini memiliki ketimpangan-ketimpangan yang mendasar dan substansial. Terutama sekali bila dikaitkan dengan pemerataan hasil pembangunan itu sendiri.

Sampai akhir Pelita V apa yang telah dicapai dari proses pembangunan yang dijalankan menunjukkan fakta yang memerlukan pemikiran yang mendalam, usaha yang gigih, serta kesepahtakwaan yang bulat dan seksama untuk menanggulangnya. Data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia masih tergolong negara yang miskin dengan tingkat pendapatan



perkapita US\$ 675. Meskipun demikian ada peningkatan yang cukup tajam pada jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, di mana pada tahun 1970 adalah sebesar 60%, sedangkan tahun 1990 tinggal 15%.

Sisi lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah bahwa kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia ditopang oleh keberadaan pengusaha kecil. Data terakhir menunjukkan jumlah pengusaha kecil di Indonesia mencapai 32,6 juta. Bila satu unit usaha kecil menghidupi satu keluarga dengan dua anak berarti jumlah jiwa masyarakat Indonesia yang bergantung hidupnya dari usaha tersebut mencapai lebih kurang 130,4 juta jiwa, atau lebih kurang 76,71 dari total penduduk Indonesia.

Dibandingkan dengan sebagian kecil masyarakat Indonesia (lebih kurang 10%) yang menikmati porsi yang amat besar dari hasil pembangunan, maka kenyataan yang digambarkan di atas merupakan sesuatu yang amat pahit. Hal ini jelas bila dikaitkan dengan apa yang dicita-citakan oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dimaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang antara lain mengatakan bahwa negara pemerintahan Indonesia dibentuk tidak lain adalah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Repository
University of Riau
http://repository.unri.ac.id
Copyright © 2014
Universitas Riau

Untuk masa-masa yang akan datang negara Indonesia sepertinya punya niat yang sungguh-sungguh agar kenyataan tersebut dientaskan. Terbukti dengan disepakatinya GBHN 1993 oleh MPR yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan dan pembinaan usaha nasional yang meliputi usaha koperasi, usaha negara dan swasta diarahkan agar tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak terutama pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam pembangunan usaha nasional harus dijaga penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan ekonomi pada satu kelompok atau golongan masyarakat tertentu dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat. Khusus mengenai pembinaan usaha kecil, usaha informal dan tradisional GBHN menekankan perlu ditingkatkannya pembangunan sarana dan prasarana usaha yang disertai dengan perbaikan iklim usaha yang mendukung. Agar usaha tersebut tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang andal, mandiri dan maju serta mampu berperan dalam menciptakan usaha dan lapangan kerja.

Amanat GBHN tersebut tidak lain merupakan misi utama yang diemban oleh seluruh



masyarakat Indonesia dalam rangkaian strategis pembangunan dimasa yang akan datang. Untuk itu pulalah presiden ditetapkan sebagai mandataris yang akan menjalankan misi dan strategi tersebut. Melalui segenap jajaran birokrasi pemerintahan yang ada harus ditetapkan program-program yang konstruktif dan aplikatif sehingga mengena pada arah yang ditetapkan seperti apa yang telah digariskan.

Masalah sekarang, siapakah jajaran birokrasi pemerintahan Indonesia yang menerjemahkan keinginan tersebut ke dalam bentuk kegiatan yang betul-betul mampu mencapai sasaran yang ditetapkan?

Meskipun baru berjalan dalam waktu yang relatif singkat, ternyata ada semacam kendala baru yang timbul di samping kendala yang sudah melekat dalam upaya pembinaan usaha kecil dan koperasi. Pada dasarnya kendala tersebut sudah merupakan sesuatu yang selama ini menjerat birokrasi pemerintahan Indonesia. Setiap departemen terkait seperti dijangkiti “demam pembinaan usaha kecil dan koperasi”. Akibatnya tidak jarang program yang dijalankan tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh para pengusaha tersebut. Ego sektoral yang muncul dalam program pembinaan menyebabkan usaha kecil dan koperasi bagaikan, “*Si kudung mendapatkan cincin*”. Beta-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

apapun cantiknya cincin permata yang ia dapatkan, namun karena ia tidak mempunyai jari-jari tangan tempat ia memasangnya, maka ia hanya bisa *cengar-cengir* dengan cincin itu.

Pada dasarnya sekumpulan usaha kecil memiliki produk yang angat beraneka ragam. Oleh karena itu strategi pengembangannya akan berbeda untuk setiap produk dan lini produk yang dihasilkan. Dengan demikian peran setiap usaha kecil yang dibina akan berbeda-beda pula. Sebenarnya besar cakupan peran setiap usaha kecil tersebut di dalam lingkungan usahanya yang demikian kompleks, merupakan suatu aspek yang harus benar-benar yang harus dipahami oleh instansi pembina.

Departemen koperasi dan PKK harus mampu memberikan informasi yang akurat pada setiap lembaga lain yang akan ikut serta menyelesaikan upaya pembinaan usaha kecil dan koperasi tentang unit-unit usaha kecil yang potensial untuk dikembangkan. Dasar pemikirannya harus berpijak pada pemikiran strategis dengan mengamati factor internal dan eksternal yang seksama dan teliti dari setiap unit usaha kecil yang akan dikembangkan akan lebih transparan dan baku.

Selanjutnya untuk setiap daerah tingkat II sudah selayaknya dibentuk suatu lembaga tersendiri yang bertugas mengkoordinir program pembinaan yang akan dilaksanakan. Lembaga tersebut



merupakan *projec team* yang personalnya diambil dari berbagai instansi terkait, termasuk pula dari unsur perguruan tinggi. Akan sangat menguntungkan pula bila dalam *projec team* tersebut melibatkan unsur ABRI untuk memperkuat proses pelaksanaan program. ♦

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Repository of Unri

<https://repository.unri.ac.id>

© Hak cipta milik Universitas Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



BLOK LENGGANG DI TEMPAT DATAR

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Riau)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Selama ini secara ekonomi, rakyat merasa terkungkung dengan dua pilar yang sangat kokoh. *Pertama*, kekuatan birokrasi yang menciptakan parsialitas dan perbedaan kelas masyarakat. Rakyat berada pada posisi objek yang hanya layak untuk di eksploitisir. *Kedua*, kekuatan modal dari sebahagian kecil masyarakat yang berkooptasi dengan birokrasi. Akses masyarakat terhadap sumber-sumber (modal, bahan mentah, dan informasi) seperti membentur tembok. Bahkan yang sering terjadi adalah perampasan hak rakyat yang pada akhirnya bermuara pada proses pemiskinan berulang dan kontinyu.

Ke depan, kondisi demikian seharusnya tidak terulang lagi. Proses pemberdayaan rakyat selanjutnya tergantung pada kesungguhan untuk menempatkan ulang (*repositioning*) masyarakat itu sendiri. Pola otonomi dan partisipatif yang dilancarkan kepada eksistensi masyarakat dimana ia berada akan sangat penting dan terkait dengan



keragaman adat istiadat yang dianut masyarakat tersebut. Rakyat Kuantan Singingi yang ingin membentuk kesatuan wilayah sendiri menjadi sebuah kabupaten, dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyatnya harus mampu mengkristalisasikan keberadaan adat sebagai pilar utama. Pola dan model yang dikembangkan harus bermula dari keberadaan sosio-kultur masyarakat itu sendiri.

Visi dan Misi

Ke arah mana ekonomi rakyat Kuantan Singingi harus dibawa sudah tergambar sangat jelas. Visi ekonomi rakyat Kuantan Singingi dalam perspektif adat menyatakan, *Bumi sonang padi menjadi. Padi kuniang jaguang moupia. Teronak bekombang biak. Anakny sonang sentosa. Bapak kayo Ondek berome. Mamak disomba urang pulo*. Dalam visi ini terdapat sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan. *Pertama*, sektor pertanian dengan dua sub-sektor, yakni pertanian tanaman pangan dan peternakan (*Padi kuniang jaguang moupia. Teronak bekombang biak*). Ini berarti swasembada pangan menjadi arah utama kesejahteraan masyarakat Kuantan Singingi. Latar belakangnya tentu dari kondisi alamnya yang sangat subur.

Kedua, sektor tenaga kerja yang secara sadar ditempatkan pada posisi *partner*. Dalam perspektif adat Kuantan Singingi tenaga kerja ditempatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

bukan hanya sebagai aset yang dieksploitisir, tetapi harus diberdayakan (*Anak bua sonang sentosa*). Ketiga, sektor keuangan dan investasi. Kemakmuran masyarakat harus ditopang oleh tersedianya modal dan aset ekonomi yang likuid. Kepemilikannya harus berada pada masyarakat itu sendiri, sehingga ketergantungan dari pihak lain dapat diminimalkan (*Bapak kayo Ondeke berome*). Perspektif ini juga dapat diartikan bahwa sektor pertambangan juga menjadi andalan. Ini diperkuat oleh tersedianya sumber-sumber pertambangan di Kuantan Singingi. Sudah sejak dulu masyarakat terlibat dalam mendulang emas untuk menambah penghasilan keluarga.

Keempat, sektor budaya sebagai pengikat dari perkembangan sektor lain. Pengembangan budaya di Kuantan Singingi memiliki arti ekonomi yang sangat penting. Pacu Jalur yang dilakukan selama ini merupakan atraksi budaya yang laku dijual sebagai komoditas pariwisata. Dalam kaca mata masyarakatnya, budaya merupakan alat yang sangat penting untuk menata kehidupan dan dinamika masyarakat. Karena itu, Ninik Mamak harus dikedepankan sebagai simbol kesejahteraan suatu komunitas (*Mamak disomba urang pulo*).

Upaya untuk mencapai visi tersebut oleh masyarakat Kuantan Singingi dituangkan ke dalam misi kegotong-royongan dan kekeluargaan yang sangat kental. Masyarakat dalam perspektif adat-



nya mengakui adanya kesamaan hak dan tanggung jawab dalam mengemban kesejahteraan bersama sebagaimana disebutkan, *Ke bukik samo mendaki, ke lurab samo menurun. Tatungkuik samo makan tanah, tatelonang samo minum aia. Kato surang dibulati, kato basamo dipeiyokan. Meukua samo panjang, menimbang samo berek. Kenek kayu kenek baan, godang kayu godang baan*. Misi ini dalam praktek diimplementasikan dalam bentuk *betobo* atau *perari*, yaitu bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan yang membawa hasil.

Sistem ekonomi yang diterapkan dalam mengemban misi tersebut didasarkan kepada; *Elok lenggang pek nan datar. Ilang rono dek panyakik, ilang bangsa dek berome. Dek ome segelo kome, dek padi segelo jadi*. Artinya, diperlukan kondisi yang kondusif untuk menjalankan inisiatif dan kreativitas masyarakat agar produktivitasnya meningkat dan sustainable. Tidak akan tercapainya kinerja yang tinggi bila secara fundamental masyarakat tidak memiliki aset ekonomi yang saling berkesesuaian dan adil. Investasi diperlukan di segala sektor. Untuk itu kebiasaan menabung harus dikembangkan agar memiliki kekuatan dan berdaya secara ekonomi.

Strategi ke Depan

Memasuki millenium kedua mendatang,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tempena akan dibentuknya Kabupaten Kuantan Singingi yang mandiri, maka strategi pemberdayaan ekonomi rakyat hendaknya tidak keluar dari visi dan misi dalam perspektif adat di atas. Menjadi kabupaten sendiri mengandung beban yang cukup berat, yakni mengembalikan posisi masyarakat Kuantan Singingi pada kesejahteraan ekonominya. Strateginya dimulai dari pengembangan partisipasi masyarakat, penataan kepemilikan aset ekonomi secara adil, penciptaan lingkungan investasi yang kondusif, pembukaan akses terhadap sumber-sumber dan keterisolasian masyarakat, kristalisasi nilai-nilai adat dan budaya, dan pengembangan sistem informasi dan pemasaran yang merata.

Langkah-langkah yang implementatif harus disesuaikan dengan tahapan kepentingannya. *Pertama*, keberadaan lembaga pembiayaan yang independen dan memihak kepada rakyat mendesak untuk direalisasikan. Untuk itu pembentukan Bank Rakyat Kuantan Singingi (BRKS) yang sahamnya selain dimiliki oleh swasta dan masyarakat perlu ditindaklanjuti sesegera mungkin. *Kedua*, Badan Informasi dan Pengembangan Kerjasama Ekonomi Rakyat (BIPKER) dibentuk di setiap kecamatan sebagai lembaga konsultasi dan advokasi pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ketiga, pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk pengembangan komoditas perikanan



berkualitas ekspor. Termasuk pula pengembangan potensi danau-danau kecil yang tersebar di berbagai daerah untuk usaha keramba ikan. *Keempat*, penataan agroindustri dari hulu sampai ke industri hilir dengan skala ekonomi yang berorientasi pasar. *Kelima*, pengembangan peternakan dan industri pengolahan hasil ternak untuk pemenuhan kebutuhan lokal dan ekspor.

Keenam, mengombinasikan aset budaya, potensi alam, dan souvenir tradisional ke dalam suatu paket wisata yang menarik. Termasuk di sini mereposisikan kembali kota Teluk Kuantan sebagai kota budaya dan pendidikan. Untuk itu keberadaan perguruan tinggi yang berorientasi teknologi industri dan manajemen informasi sangat diperlukan. *Ketujuh*, mereposisikan potensi perkebunan dan pertambangan untuk kemakmuran rakyat. *Kedelapan*, penataan kelembagaan ekonomi rakyat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang pada akhirnya dapat diarahkan menjadi Koperasi yang berbasis masyarakat. Terakhir, pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti perbaikan prasarana transportasi ke setiap desa sebagai pembuka isolasi masyarakat. ♦

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.